

ANALISIS MODEL DAN MEDIA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN¹

Kamaruddin Hasan²

Poin-poin penting yang disampaikan dalam panel forum dengan Optimalisasi Komunikasi Pembangunan Partisipatif menuju Aceh yang lebih baik.

Participation Rural Communication Appraisal

Participation Rural Communication Appraisal (PRCA) diperkenalkan pertama kali pada 1994 adalah sebuah metode riset komunikasi yang menggunakan teknik visualisasi, wawancara, dan kelompok kerja berbasis lapangan untuk menghasilkan informasi. Pendekatan ini merupakan formulasi dari pendekatan-pendekatan partisipatif lainnya yang menggabungkan ide-ide dan teknik-teknik dari pendekatan kerangka kerja logis, perencanaan proyek berorientasi tujuan. (Anyaegebunam, C. et. al. 2004).

Dominasi penggunaan metode PRCA ketimbang metode komunikasi pembangunan lainnya di Aceh dapat dipahami, sebab saat ini Aceh tengah membangun berbagai infrastruktur publik lebih dominan ketimbang pembangunan lainnya, serta terdapat beberapa perusahaan bersekala besar yang melibatkan warga. Sehingga nilai-nilai demokrasi dalam pembangunan tidak begitu tampak dalam proses pembangunan yang dilakukan. Hal ini seperti yang disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi, bahwa Pemerintah saat ini lebih fokus pada sektor pembangunan infrastruktur, biar tidak berbentur dengan kepentingan masyarakat. Misalnya saja saat pembangunan Waduk Krueng Kereuto di Aceh Utara, ada keterlibatan masyarakat lokal dalam banyak diskusi dan tenaga lokal.

Metode PRCA dalam komunikasi pembangunan di Aceh dilakukan sejak awal aktifitas pembangunan yaitu pada tahap perencanaan dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan pembangunan yang direncanakan serta hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. pengumpulan informasi dianggap penting agar tidak ditemukan kemudian adanya pihak-

¹ Disampaikan dalam acara Panel Forum dan Kongres Alumni Ilmu Komunikasi Fisip Unimal. Tema; Optimalisasi Komunikasi Pembangunan Partisipatif; menuju Aceh yang lebih baik, Lhokseumawe, 10 November 2016

² Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal, Ketua ASPIKOM Aceh dan Ketua lembaga penelitian Developing Research and Empowerment (DeRE-Indonesia).

pihak penentang pembangunan. Kesepakatan antara kedua belah pihak (masyarakat dan penggagas pembangunan) menjadi satu hal yang mutlak.

Secara praktis, metode PRCA yang dilakukan oleh pemerintah Aceh ialah berupa komunikasi dialogis antara komunikator dengan komunikan, yaitu masyarakat sasaran pembangunan, sharing dan belajar bersama masyarakat, sharing dan belajar bersama masyarakat. partisipasi masyarakat terwujud dalam perancangan program pembanguana, materi dan metode komunikasi yang efektif bagi pembangunan untuk menjamin kesesuaian dan kepemilikan oleh masyarakat. Komunikasi persuasif pemerintah dengan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat ialah agar pemerintah peka terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Pendekatan secara persuasif penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik.

Participaton Communication Strategy Design

Participation Communication Strategy Design (PCSD). Metode ini diperkenalkan pada tahun 2004 sebagai lanjutan dari strategi PRCA Sebagai suatu kelanjutan logis dari PRCA, PCSD menyertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mungkin mengarahkan pada perencanaan komunikasi efektif dan tindakan untuk meningkatkan mata pencaharian. PCSD focus pada cara-cara berpartisipasi dengan masyarakat, bagaimana menghadirkan permasalahan dan kebutuhan praktis yang diidentifikasi. Mendesain pesan dan menciptakan tema diskusi sesuai dengan prinsip media komunikasi, materi dan aktivitas -aktivitas pembangunan dan produksi. Desain strategi ini juga menentukan syarat untuk efektifitas penggunaan pendekatan komunikasi, teknik, media, materi, dan metode di antara masyarakat pedesaan. PCSD dapat digunakan pada berbagai proyek pembangunan seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, meningkatkan pendapatan, gender, air dan sanitasi, peternakan, dan kemiskinan. (Jumrana, 2012: 30)

Secara spesifik model PCSD lebih cocok digunakan dalam proses pembangunan yang bersentuhan langsung pada program-program pembangunan kerakyatan. Yaitu, pembangunan yang berbasisan masyarakat. Sebagai contoh pada program pengentasan kemiskinan, pemerintah melalui SKPD terkaita meminta pendapat langsung dari masyarakat terkait dengan usaha apa yang hendak dilakukannya. Program Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), rehap rumah fakir miskin,

petani tambak, perani sawah dan lain-lain yang tengah digeluti oleh pemerintah Aceh menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai fasilitator bagi pengusaha tersebut.

Dalam konteks pemberdayaan ini, terutama upaya untuk mengoptimalkan hasil sumber daya alam; pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan dan lainnya, UMKM dan lain-lain yang berbasis rakyat terpinggirkan mesti dilakukan secara holistik dan komprehensif, walau masih terdapat berbagai kelamahan. Metode seperti ini disebut sebagai komunikasi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat rentan. Artinya komunikasi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat di tingkat bawah dengan pola partisipasi yang tinggi.

Tahapan penting terpenting melalui PCSD dalam komunikasi pembangunan ialah identifikasi persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran pemberdayaan. Sehingga program kerja dan program pembangunan benar-benar bersumber dari masyarakat dan berdasarkan pada keinginan yang mereka harapkan. Pembangunan yang tidak berorientasi pada kebutuhan warga cenderung menuai persoalan di kemudian hari berupa penolakan yang dapat menghambat pembangunan itu sendiri. Pada saat proses komunikasi berlangsung hal yang harus dipertimbangkan ialah, bagaimana kemasan pesan dikemas sebaik mungkin. Pesan yang direncanakan dengan baik, akan lebih mudah diterima oleh warga juga sebaliknya.

Media Komunikasi Pembangunan

Penggunaan media komunikasi yang tepat menjadi sebuah keniscayaan dalam proses komunikasi pembangunan. Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta luasnya jangkauan daerah serta jumlah masyarakat yang sangat banyak. Penggunaan satu media komunikasi juga salurannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan informasi pembangunan oleh warga. Keragaman media komunikasi yang dimiliki saat ini, termasuk media sosial atau *new media* merupakan aset dan peluang terbesar pemerintah Aceh dalam mengkomunikasikan pembangunan.

Terdapat tiga bentuk media yang dimanfaatkan oleh pemerintah, yaitu media tradisional, media konvensional dan media digital (*cyber media*). Media tradisional biasanya digunakan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan yang masih sangat dekat dengan masyarakat. Namun, sejauh amatan penelitian yang peneliti lakukan, penggunaan media jenis ini

sangat sulit ditemukan dalam proses komunikasi. Dalam konteks masyarakat Aceh misalnya, biasanya media tradisional yang digunakan dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas adalah dengan lantunan syair. Sayangnya saat ini media tersebut sudah jarang ditemukan.

Mestinya media tradisional juga di gunakan dalam proses komunikasi pembangunan dengan warga, hanya saja sampai saat ini, komunikasi dengan media tersebut sangat sulit ditemukan, walaupun ada adanya di kampung-kampung yang masih jauh dari teknologi.

Kedua, media konvensional, yaitu berupa media modern yang tidak dapat dilakukan sebuah proses timbal balik. Proses komunikasi yang terjadi dalam media ini cenderung bersifat satu arah saja. Jika diidentifikasi, maka terdapat dua media komunikasi konvensional yang digunakan yaitu koran, televisi dan radio. Kendati radio adalah salah satu media yang telah mengalami perubahan dalam hal teknologinya, namun dalam konteks komunikasi pembangunan ini, peneliti melihat bahwa penggunaan media radio hanya masih sebatas pada iklan-iklan pemerintah.

Sama halnya dengan penggunaan koran. Dalam banyak pemberitaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh diantaranya ialah melalui iklan advetorial. Sedangkan pemberitaan pembangunan sangat minim. Dampaknya ialah, masyarakat tidak dapat menjalin sebuah proses komunikasi yang timbal balik menyikapi pemberitaan pembangunan tersebut. *Harian Serambi Indonesia* dan *Rakyat Aceh* adalah dua media cetak yang umumnya digunakan oleh Aceh dalam menyebarkan informasi.

Dan, ketiga ialah komunikasi pembangunan melalui media digital berbasis pada internet. Dalam hal ini, memilah dua bentuk media digital, yaitu *web site* dan media sosial (medsos). Amatan penulis ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital belum begitu optimal dan maksimal. Melalui laman resmi pemerintah Aceh informasi pembangunan juga masih lemah dalam pemberitaan. Informasi yang berada di dalamnya hanya sebatas pada pemberitahuan hal-hal yang tidak terkait dengan pembangunan yang berkenaan dengan masyarakat.

Pemanfaatan *web site* pemerintah Aceh tidak melakukannya dengan maksimal, apalagi melalui media sosial. Temuan penelitian ini berdasarkan pada peninjauan melalui *Facebook* dan *twitter*. Sedangkan melalui analisis

terhadap kontennya peneliti menemukan bahwa informasi tidak ter-update dengan sirkulasi berita yang tinggi. Sedangkan twitter sebagai media yang tengah mengetrend saat ini pemerintah Aceh tidak membukanya dengan publik. Menurut pengakuan dari pemerintah melalui Humas bahwa group twitter untuk masyarakat sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan warga tidak ada.

Pemilihan dari beragamnya media komunikasi yang tersedia umumnya dilakukan berdasarkan pada karakteristik masyarakat sasaran penerima informasi. Penggunaan media tradisional lumrahnya digunakan pada sasaran masyarakat pedesaan, sedangkan melalui media digital tidak dibatasi oleh ruang, sebab banyak desa saat ini sudah terhubung baik dengan internet.

Kurang optimalnya penggunaan media dalam proses komunikasi pembangunan yang dijalani, dikarenakan cara pendekatan pemerintah baik dalam penyuluhan, perencanaan pembangunan, sosialisasi program dan sebagainya ialah umumnya dilakukakn melalui pendekatan personal melalui komunikasi interpersonal dalam sebuah diskusi dan forum. Cara tersebut dianggap efektif karena dianggap lebih cocok untuk mendengarkan secara langsung maksud dan tujuan program. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh beberapa pegawai Pemerintahan, bahwa pemerintah masih cenderung menggunakan cara-cara personal dengan pendekatan persuasif. Dengan mengajak diskusi masyarakat wilayah pembangunan, merangkulnya dan melibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bagian dari proses pembangunan.

Media dalam proses komunikasi adalah sebuah sarana dan perantara agar pesan tersampaikan kepada khalayak yang dituju. Dengan PRCA sebagai metode dalam komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan terlihat bagaimana masyarakat melibatkan dirinya dalam pembangunan. partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebuah keharusan, agar pembangunan dapat berjalan seperti yang diharapkan serta berkelanjutan. Karena masyarakat (penduduk setempat) adalah pihak yang sangat rentan terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh pembangunan itu sendiri.